

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan yang berkepentingan dengan perusahaan (investor, kreditur dan lain-lain). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, skedul dan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1.) Menurut Belkaoui (2000) laporan keuangan bertujuan untuk:
 - a. Menilai kinerja
 - b. Menilai kualitas manajemen
 - c. Mengestimasi prospek di masa mendatang
 - d. Menilai kekuatan dan stabilitas keuangan
 - e. Menilai kesanggupan melunasi utangnya
 - f. Menilai tentang likuiditas
 - g. Menilai risiko dan ketidakpastian
 - h. Membuat perbandingan

2.) Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2009).

2.1.2 Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat berbagai jenis informasi terkait dengan kondisi dan kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Berbagai informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan keuangan, seperti keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan serupa lainnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, manajemen mengungkapkan informasi baik oleh perusahaan maupun oleh pihak lain, seperti analis keuangan dan auditor. Para pengguna informasi tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Dalam PSAK (2009) No.1 disebutkan pihak-pihak yang menggunakan informasi yang diungkapkan perusahaan sebagai salah satu dasar pembuatannya adalah sebagai berikut:

1. **Investor.** Investor membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan investasi terbaik, apakah harus membeli; menahan; atau menjual sebuah investasi. Keputusan investasi tersebut dibuat dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang melekat pada setiap keputusan. Berbagai informasi seputar perusahaan juga membantu investor, dalam hal ini para pemegang saham, dalam menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.

2. **Pemberi pinjaman.** Pemberi pinjaman memiliki kepentingan terhadap informasi seputar perusahaan terkait dengan keputusan pemberian pinjaman yang diberikannya kepada perusahaan. Informasi tersebut sangat penting untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar pokok pinjaman dan bunganya pada waktu dan jumlah yang telah ditetapkan.
3. **Karyawan.** Informasi utama yang dibutuhkan karyawan dan pihak lain yang mewakilinya adalah informasi yang menyangkut stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Informasi tersebut sangat penting karena terkait dengan sistem renumerasi yang akan diberikan perusahaan kepada setiap karyawan dalam berbagai bentuk. Selain itu, karyawan juga membutuhkan informasi tersebut untuk memberikan kepastian mengenai kelangsungan kinerjanya di perusahaan.
4. **Pemasok dan kreditor usaha lainnya.** Informasi seputar perusahaan menjadi komoditas yang dibutuhkan para pemasok dan kreditor usaha lainnya terkait dengan keputusan pembatasan transaksi kredit dan tenggat waktu pelunasan hutang. Pemasok dan kreditor lainnya membutuhkan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang.
5. **Pelanggan.** Pelanggan memiliki kepentingan terhadap informasi perusahaan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut penting bagi pelanggan yang terikat perjanjian jangka panjang dengan perusahaan atau memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan.
6. **Pemerintah.** Pemerintah dan lembaga yang berada di bawahnya memiliki kepentingan terhadap perusahaan terkait dengan pengalokasian sumber daya

oleh perusahaan. Pemerintah juga memiliki kepentingan terhadap informasi perusahaan dalam berbagai kebijakan terutama kebijakan yang mengatur tentang segala aktivitas perusahaan.

7. **Masyarakat.** Kepentingan masyarakat terhadap informasi perusahaan adalah untuk melihat tingkat kemakmuran perusahaan dan aktivitas perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya pada khususnya dan kemajuan negara pada umumnya.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap laporan keuangan menyajikan informasi yang berbeda. Namun antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan lain saling terkait. Tidak ada laporan keuangan yang secara mandiri dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi untuk satu jenis keputusan tertentu (Henderson, 2004). Satu keputusan ekonomi memerlukan informasi yang disajikan dalam dua atau lebih laporan keuangan.

Masing-masing laporan keuangan mempunyai fungsinya sendiri. Neraca mempunyai fungsi untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan kas dan setara kas di masa depan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam pemenuhan komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Laporan laba rugi diperlukan untuk menilai kemajuan usaha perusahaan selama satu periode tertentu atau selama satu tahun buku. Laporan perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan.

2.2 Laporan Tahunan

2.2.1 Komponen Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan media pelaporan keuangan oleh perusahaan. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu komponen dari laporan tahunan. Henderson (2004) menyebutkan bahwa terdapat 7 komponen laporan tahunan, yaitu:

1. Sambutan direktur kepada para pemegang saham

Dalam bagian awal laporan tahunan, terdapat sambutan dari direktur utama perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham. Sambutan tersebut menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan kedepannya.

2. Ikhtisar data keuangan

Ikhtisar data keuangan merupakan penyajian data keuangan penting selama 10 tahun terakhir. Penyajian data keuangan tersebut dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren pergerakan keuangan perusahaan dalam 10 tahun terakhir.

Salah satu data yang disajikan dalam bagian ini adalah tingkat penjualan bersih. Dalam bagian ini juga sering disajikan data nonkeuangan, seperti toko yang dimiliki perusahaan dari periode ke periode. Hal ini berguna untuk melihat kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek perusahaan di masa mendatang.

3. Laporan keuangan

Perusahaan menyajikan empat jenis laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Perusahaan menyajikan laporan keuangan secara komparatif untuk beberapa periode. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya. Untuk perusahaan yang terdiri dari beberapa anak perusahaan harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasi data yang disajikan dalam laporan keuangan, maka perusahaan harus menyajikan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Secara garis besar, catatan atas laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan transaksinya. Bagian ini sering disajikan pada awal catatan

atas laporan keuangan atau pada bagian tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan. Dalam bagian ini, perusahaan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi, seperti metode penilaian persediaan, prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi, metode penyusutan aktiva tetap, kapitalisasi bunga, dan prinsip akuntansi lainnya.

- b. Catatan penjelasan. Terdapat bagian dalam catatan atas laporan keuangan yang sifatnya memberikan penjelasan terperinci atas item-item yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti penjelasan untuk aktiva tetap perusahaan, hutang jangka panjang, transaksi sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan, dan transaksi dalam mata uang asing.
- c. Catatan yang berupa informasi pelengkap. Dalam catatan atas laporan keuangan terdapat pengungkapan informasi yang sifatnya melengkapi informasi yang telah tersedia di laporan keuangan. Dalam FASB, salah satu contoh informasi pelengkap yang disyaratkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan per kuartal. Perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan interim setiap kuarternya. Informasi-informasi tertentu dalam laporan keuangan interim, seperti tingkat penjualan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba per saham, harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan akhir periode.

5. Laporan Pertanggungjawaban Manajemen

Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan. Dalam bagian ini, pada umumnya pihak manajemen menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab mereka dan bahwa laporan keuangan tersebut telah melalui proses audit.

6. Hasil Diskusi dan Analisis Manajemen

Terdapat bagian dalam laporan tahunan yang menyajikan hasil pembahasan dan analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai perusahaan. Dalam bagian ini, manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya. Selain itu, manajemen juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti pengaruh hari raya terhadap tingkat penjualan.

7. Laporan Hasil Audit

Auditor bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Auditor merupakan pihak independen yang memiliki peranan penting dalam menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Setelah pelaksanaan proses audit, auditor akan memberi opini terhadap penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dalam sebuah laporan hasil audit.

2.2.2 Peraturan Terkait Penyajian Laporan Tahunan

Penyajian informasi dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia telah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam beberapa peraturannya. Penyajian informasi dalam laporan tahunan diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-38/PM/1996. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk menggantikan peraturan tentang laporan keuangan tahunan sebelumnya, yaitu keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-17/PM/1995. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-38/PM/1996 mewajibkan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam.

Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* melatarbelakangi pembuatan berbagai kebijakan baru guna mengatur praktek *Good Corporate Governance*, termasuk dalam perusahaan. Hal ini turut mempengaruhi bapepam dalam pembuatan peraturan penyajian laporan tahunan. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mengeluarkan peraturan No.Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 7 Desember 2006. dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Ketua bapepam No.Kep-38/PM/1996 tentang laporan Tahunan tidak berlaku lagi.

Perbedaan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya terletak pada komponen laporan tahunan. Untuk keputusan Ketua Bapepam No.Kep-38/PM/1996, komponen dari laporan tahunan adalah Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan

yang Telah Diaudit, dan Laporan Manajemen. Sedangkan untuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-134/BL/2006, komponen laporan tahunan mengalami perluasan. Laporan tahunan diwajibkan untuk membuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan manajemen, Tata Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan yang Telah Diaudit. Peraturan terbaru yang mengatur tentang kewajiban penyajian Laporan tahunan bagi emiten disajikan secara lengkap dalam Lampiran 5.

2.3 Pengungkapan

2.3.1 Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Suwardjono, 2005). Hendriksen dan Brenda (1991) menyatakan secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*). Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak lebih terbatas, yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam pengertian tersempitnya mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap.

Dalam arti luas, pengungkapan berkenaan dengan informasi yang disajikan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya seperti : catatan kaki, peristiwa sesudah tanggal laporan,

analisis manajemen mengenai operasi pada tahun yang akan datang, peramalan keuangan dan operasi, serta laporan tambahan mengenai *segmental disclosure*.

Menurut Belkaouli (2000) tujuan pengungkapan antara lain:

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain dengan ukuran dalam laporan keuangan
2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditur dalam menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui
4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun
5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang
6. Untuk membantu investor dalam menentukan return dan investasinya

Manfaat utama pengungkapan informasi bagi perusahaan adalah dapat diperolehnya biaya modal yang lebih rendah (Healy dan Palepu, 2001). Biaya modal yang lebih rendah tersebut diperoleh oleh perusahaan berkaitan dengan berkurangnya risiko informasi bagi investor dan kreditur. Pengungkapan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan menjadi lebih lengkap dan akurat

sehingga risiko kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan tersebut menjadi berkurang. Dengan demikian, investor dan kreditur bersedia membeli sekuritas dengan harga tinggi, akibat dari harga sekuritas yang tinggi tersebut biaya modal perusahaan menjadi rendah.

Manfaat pengungkapan bagi kepentingan investor adalah berkurangnya risiko informasi. Berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor akan mengurangi kesalahan pembuatan keputusan investasi. Dengan demikian, investor menjadi lebih percaya kepada perusahaan yang memberikan pengungkapan secara lengkap, akibatnya sekuritas perusahaan menjadi lebih menarik bagi banyak investor dan harganya akan naik. Kenaikkan harga saham ini pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran investor.

Pengungkapan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Manfaat dapat diperoleh sebagai akibat dari adanya biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor. Dengan diperolehnya biaya modal yang lebih rendah oleh perusahaan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, kesempatan kerja menjadi lebih luas, dan pada akhirnya standar kehidupan akan meningkat pula. Sebagai akibat berkurangnya risiko informasi yang dihadapi investor, pasar modal menjadi lebih likuid. Likuiditas pasar modal ini diperlukan oleh perekonomian nasional, karena dapat membantu alokasi modal secara efektif.

2.3.2 Metode Pengungkapan

Pengungkapan melibatkan keseluruhan proses pelaporan. Tetapi, terdapat beberapa metode yang berbeda-beda untuk pengungkapan. Pemilihan metode

terbaik dari pengungkapan ini pada setiap kasus tergantung pada sifat informasi yang bersangkutan dan kepentingan relatifnya. Kesio dan Weygandt (2007) menjelaskan beberapa metode umum yang tersedia untuk melakukan suatu pengungkapan dan metode tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bentuk dan susunan laporan formal
2. Terminologi dan penyajian terinci
3. Informasi sisipan atau informasi dalam bentuk tanda kurung (*parenthetical information*)
4. Catatan kaki (*footnotes*)
5. ikhtisar tambahan dan skedul-skedul (*supplementary statements and supplementary schedules*)
6. Komentar dalam laporan auditor
7. Surat direktur utama atau dewan komisaris

Bentuk dan susunan laporan keuangan dan terminologi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan adalah cara pengungkapan untuk elemen-elemen yang diakui dalam laporan keuangan. Misalnya, laporan laba rugi dapat disusun dengan cara *single step* ataupun *multiple step*. Istilah yang digunakan oleh elemen-elemen laporan keuangan adalah yang biasa digunakan oleh analis keuangan, dan pemakai lainnya yang mempunyai pengetahuan cukup tentang ekonomi dan bisnis.

Informasi dalam tanda kurung digunakan untuk memberi penjelasan tentang elemen laporan keuangan di depannya. Apabila judul atau nama pos-pos neraca dan ikhtisar laba rugi menjadi terlalu panjang untuk disajikan, maka

disajikan sebagai catatan dalam tanda kurung (*parenthetical notes*). Tanda kurung digunakan untuk menampung informasi yang singkat mengenai elemen laporan keuangan, seperti: prosedur penilaian yang digunakan, metode pengukuran, digunakan sebagai jaminan atau tidak, alternatif penilaian lain seperti harga pasar, dan petunjuk kepada bagian lain di pelaporan keuangan yang berkaitan dengan elemen yang bersangkutan. Informasi yang disajikan sangat singkat sehingga tidak mengaburkan elemen laporan keuangan utamanya.

Catatan kaki (*footnotes*) digunakan untuk memberi penjelasan yang lebih rinci daripada informasi dalam tanda kurung. Catatan kaki atau catatan ini dapat digunakan untuk menampung berbagai jenis informasi yang tidak cukup jika dimasukkan dalam tanda kurung. Kebijakan akuntansi, perubahan akuntansi, utang kontinjensi, kebijakan pembagian dividen, antara lain adalah beberapa informasi yang diungkapkan dalam *footnotes*. Dalam prakteknya, *disclosure* dalam bentuk *footnotes* dikenal sebagai *notes to financial statements* atau catatan-catatan mengenai ikhtisar keuangan.

Ikhtisar-ikhtisar keuangan dasar digunakan untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami. Oleh karena itu, maka bentuk ikhtisar-ikhtisar keuangan ini relatif sangat ringkas dan merupakan penyajian data agregatif. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal tertentu, diperlukan adanya perincian yang lebih jelas. Perincian semacam ini biasanya dicantumkan dalam *supplementary statements* dan *supplementary schedules*. *Supplementary schedules* biasanya merupakan perincian dari pos-pos tertentu dalam ikhtisar

keuangan dasar, seperti: daftar harga pokok, daftar aktiva tetap, daftar umur piutang, dan sebagainya.

Surat dari direksi kepada pemegang saham berfungsi sebagai laporan perusahaan tentang usaha yang telah dilakukannya selama satu periode. Selain itu, surat ini juga berisi mengenai perkembangan perusahaan, serta prospek perusahaan di waktu yang akan datang. Informasi yang bersifat umum, eksternal perusahaan dipandang dapat mempengaruhi operasi perusahaan dapat juga diungkapkan di bagian ini.

2.3.3 Luas Pengungkapan

Dalam menentukan seberapa banyak informasi yang diungkapkan, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kebutuhan pengguna informasi tersebut. Informasi yang diungkapkan perusahaan ditujukan untuk menjelaskan mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Jadi untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menyesuaikan tingkat pengungkapan dengan kebutuhan para pengguna informasi. Faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat pengungkapan adalah standar pengungkapan yang berlaku.

Dengan pertimbangan dua faktor di atas, Hendriksen dan Brenda (1991) mengklasifikasikan tingkat pengungkapan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate Disclosure*)

Tingkat pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan cukup merupakan konsep yang paling sering

digunakan oleh perusahaan dengan maksud laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Tingkat pengungkapan yang ditujukan untuk memenuhi tujuan etis dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pengguna informasi potensial. Jadi pengungkapan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh pengguna informasi terpenuhi.

3. pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Tingkat pengungkapan dimana seluruh informasi yang relevan disajikan perusahaan. Tetapi dalam penyajiannya, perusahaan tetap harus memperhatikan bahwa informasi yang diungkapkan tidak berlebihan. Pengungkapan yang berlebihan justru akan menyulitkan para pengguna informasi dalam menginterpretasikan informasi tersebut karena sulitnya pengguna informasi untuk menangkap inti dari informasi yang disajikan.

Dalam prakteknya, perusahaan dapat menerapkan tingkat pengungkapan yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kondisi yang melatarbelakangi kebutuhan akan pengungkapan tersebut.

2.4 Pengungkapan Sukarela

2.4.1 Teori Terkait Pengungkapan Sukarela

Menurut Henderson dkk (2004), terdapat 4 (empat) teori yang terkait dengan pengungkapan sukarela, yaitu:

1. *Signalling Theory*

Dalam teori ini, pengungkapan informasi sukarela yang dilakukan perusahaan merupakan signal bagi pasar. Ketika perusahaan mengungkapkan informasi yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lain, maka pasar akan menginterpretasikan hal tersebut sebagai “*bad news signal*” atas kondisi perusahaan tersebut.

2. *Political Theory*

Teori ini menyatakan bahwa dalam praktek bisnis, perusahaan menanggung biaya tambahan yang muncul sebagai akibat dari adanya transfer kesejahteraan, seperti biaya pajak yang tinggi, biaya pelaporan keuangan yang tinggi, permintaan karyawan akan gaji yang tinggi, dan tingginya kerugian akibat terjadinya inefisiensi dalam operasi.

Pengungkapan sukarela dalam kaitannya mencegah atau mengurangi *political cost*, dipengaruhi dua faktor. Yang pertama adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka kecenderungan perusahaan tersebut melakukan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *political cost* yang muncul semakin besar. Faktor yang kedua adalah sifat industri perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan di industri perminyakan melakukan pengungkapan informasi yang terkait dengan aspek lingkungan lebih banyak dibanding dengan perusahaan di industri lain. Hal ini terkait dengan tekanan yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah dan masyarakat, terhadap perusahaan di industri perminyakan yang memungkinkan timbulnya *political cost* yang besar.

3. *Legitimacy Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk meyakinkan bahwa nilai-nilai perusahaan sejalan dengan nilai yang berlaku di masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Konsekuensinya adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan dari masyarakat, baik secara implisit maupun eksplisit. Dan konsekuensinya, masyarakat akan memberikan hak kepada perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan beroperasi dalam komunitas tersebut. Pada prakteknya, perusahaan sering tidak bisa atau kurang optimal dalam usahanya mewujudkan keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan selanjutnya dapat mengancam keberadaan perusahaan. Ketika hal ini terjadi, salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan tanpa mengubah kebiasaan yang dilakukan. Pengungkapan sukarela digunakan perusahaan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan dapat menginformasikan kepada masyarakat alasan kenapa perusahaan tidak dapat atau kurang optimal dalam mewujudkan keinginan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan telah cukup responsif terhadap keinginan masyarakat atau mempengaruhi masyarakat untuk mengubah ekspektasinya terhadap perusahaan.

4. *Stakeholders Theory*

Aktivitas yang dilakukan perusahaan mempengaruhi banyak pihak (*stakeholders*). Dasar dalam teori ini adalah bahwa tingkat kepentingan

stakeholders yang beragam mempengaruhi operasi dan pelaporan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan harus mampu mengidentifikasi kepentingan *stakeholders* untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Berangkat dari pandangan tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk mengelola hubungan yang baik dengan para *stakeholders*-nya.

Dalam teori ini terdapat dua perspektif, yaitu perspektif yang berpusat pada perusahaan (*Organization-Centered Perspective*) dan perspektif yang berdasar prinsip-prinsip akuntabilitas (*accountability perspective*).

Perspektif yang pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan (*Organization-Centered Perspective*). Perspektif ini muncul karena beragamnya kepentingan *stakeholders* sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh kepentingan *stakeholders*. Selain itu, perspektif ini memandang bahwa *stakeholders* memiliki tingkat kepentingan yang berbeda bagi perusahaan sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang sama. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok *stakeholders* yang memiliki peranan penting bagi perusahaan dan mengelola hubungan yang baik dengan kelompok tersebut. Dalam hal ini, pengungkapan sukarela merupakan salah satu alat untuk mengelola hubungan baik tersebut.

Perspektif yang kedua adalah perspektif yang berdasar prinsip-prinsip akuntabilitas (*accountability perspective*). Dalam perspektif ini, perusahaan harus memperhatikan hak seluruh *stakeholders*, tidak hanya pada sekelompok *stakeholders* yang dianggap memiliki peranan terpenting terhadap perusahaan.

Jadi, dalam perspektif ini pengungkapan sukarela merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap seluruh *stakeholders*. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

2.4.2 Motif Pengungkapan Sukarela

Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa terdapat 6 motif yang mempengaruhi perusahaan dalam membuat keputusan pengungkapan sukarela:

1. *Capital Market Transaction Hypothesis*

Rencana perusahaan untuk menerbitkan saham, surat hutang, atau instrumen modal lainnya mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunannya. Sebelum pelaksanaan rencana tersebut, penting bagi perusahaan untuk menciptakan persepsi yang bagus tentang kondisi perusahaan di mata investor. Persepsi investor sangat penting bagi perusahaan yang hendak menerbitkan saham, surat hutang, ataupun rencana pendanaan lainnya. Dalam kondisi demikian, penting bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan investor. Tantangan utama bagi perusahaan adalah mengatasi munculnya asimetri informasi yang sering menghilangkan kepercayaan investor terhadap manajemen. Ketika hal tersebut terjadi, maka biaya atas pendanaan eksternal akan meningkat. Hal tersebut memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela. Dengan pengungkapan tersebut diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi sehingga pada akhirnya mampu menurunkan biaya atas pendanaan eksternal.

2. *Corporate Control Contest Hypothesis*

Adanya persaingan untuk mengelola perusahaan menjadi motif perusahaan untuk menyajikan pengungkapan sukarela. Dewan komisaris dan para pemilik modal menyerahkan tanggung jawab performa saham perusahaan kepada manajemen. Pergantian CEO berhubungan dengan performa saham perusahaan. Harga saham yang rendah menjadi pemicu terjadinya pengambilalihan pengelolaan perusahaan oleh pihak lain. Ketika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan pergantian CEO cukup besar.

Risiko hilangnya pekerjaan sebagai akibat buruknya performa saham perusahaan memotivasi manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela. Pengungkapan tersebut diharapkan mampu menjadi media untuk menjelaskan alasan kenapa harga saham memburuk dan mengurangi penilaian yang buruk terhadap kinerja manajemen.

3. *Stock Compensation Hypothesis*

Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menawarkan bentuk kompensasi lain kepada jajaran manajer dan karyawan. Salah satunya adalah pemberian hak untuk membeli saham perusahaan pada tingkat harga tertentu. Kompensasi saham tersebut membuat manajer memiliki peran ganda, yaitu sebagai pihak yang menjalankan fungsi eksekutif perusahaan sekaligus sebagai pemilik saham perusahaan, meskipun dalam jumlah yang kecil. Hal tersebut yang mempengaruhi manajer dalam membuat keputusan terkait dengan tingkat pengungkapan informasi perusahaan.

Manajer yang mendapat kompensasi saham, memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan sukarela. Terdapat dua alasan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:

- a. Sudut pandang manajer sebagai pihak yang berniat untuk melakukan jual beli saham yang diperolehnya. Adanya larangan *insider trading* yang semakin diperketat, memotivasi manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela. Dengan pengungkapan tersebut, diharapkan dapat mengoreksi nilai saham yang *undervaluation* dan meningkatkan likuiditas saham perusahaan. Sehingga manajer dapat memperoleh keuntungan dari jual beli saham perusahaan pada nilai yang sebenarnya. Meskipun demikian praktek *insider trading* masih sering terjadi. Praktek ini sebenarnya menguntungkan manajer karena manajer dapat membeli saham pada tingkat harga yang lebih rendah. Pada kondisi yang seperti ini, manajer akan memilih untuk tidak melakukan pengungkapan sukarela.
- b. Sudut pandang manajer sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam hal ini manajer akan meningkatkan pengungkapan sukarela dengan maksud untuk menurunkan biaya kontrak terkait dengan kompensasi saham yang diberikan kepada karyawan baru. Kompensasi saham merupakan salah satu alternatif kompensasi yang menarik bagi manajer dan karyawan ketika harga saham yang ditentukan benar-benar mencerminkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan sukarela tersebut dapat mencegah penilaian yang salah terhadap saham perusahaan, sehingga pada akhirnya biaya kontrak atas pemberian kompensasi saham tersebut dapat ditekan.

4. *Litigation Cost hypothesis*

Aspek hukum turut berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan oleh manajer. Pengaruh pertama adalah ketika hukum atau peraturan yang berlaku menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan pada tingkat dan waktu yang tepat. Ketika hal tersebut terjadi, maka terdapat kecenderungan bagi manajer untuk meningkatkan pengungkapan sukarela, terlebih ketika terdapat informasi negatif tentang perusahaan. Manajer meningkatkan pengungkapannya dengan maksud untuk menurunkan risiko terkena tuntutan hukum. Karena ketika informasi negatif tersebut ditunda untuk diungkapkan maka potensial untuk memunculkan kerugian terhadap beberapa pihak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan terganjal masalah hukum.

Pengaruh kedua bersifat kebalikan dari pengaruh pertama. Aspek hukum justru menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan yakin bahwa perusahaan tidak melakukan kesalahan yang disengaja, termasuk dalam pengungkapan informasi kepada *stakeholders* dan perusahaan yakin bahwa sistem hukum dapat membedakan kesalahan manajemen yang benar-benar disengaja dengan yang tidak disengaja.

5. *Manajemen Talent Signaling Hypothesis*

Manajer dengan kemampuan yang baik memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan *forecast* pendapatan perusahaan dengan sukarela. Alasan utama yang melatarbelakangi pernyataan tersebut adalah bahwa nilai sebuah perusahaan

sangat tergantung persepsi investor tentang kemampuan manajer mengelola perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Ketika manajer melakukan pengungkapan sukarela terutama *forecast* pendapatan perusahaan di masa mendatang, maka investor akan menginterpretasikan bahwa manajer memiliki strategi dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. Pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan.

6. *Proprietary Cost Hypothesis*

Dalam membuat keputusan pengungkapan sukarela, manajer akan mengidentifikasi sifat dari persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat persaingan antar perusahaan. Penelitian Lang dan Lundholm (1996) membuktikan bahwa perusahaan yang tingkat kinerjanya relatif sama dengan perusahaan lain pada industri yang sama cenderung akan mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding dengan perusahaan yang berada dalam industri yang tingkat kinerjanya bervariasi. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang menurun dan berada dalam industri yang tingkat profitabilitas antar perusahaannya tidak berbeda cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Cerf (1961) membuktikan bahwa indeks pengungkapan berkorelasi positif dengan besarnya aktiva, proporsi kepemilikan saham publik,

dan profitabilitas. Indeks pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari *content analysis* terhadap item-item yang terdapat dalam laporan tahunan. Penentuan item-item tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan akan informasi dalam pembuatan keputusan investasi. Jadi, item-item yang digunakan dalam penelitian ini tidak dibedakan antara item pengungkapan wajib dan item pengungkapan sukarela.

Penelitian Singhvi dan Desai (1971), yang merupakan pengembangan penelitian Cerf dan juga menggunakan item pengungkapan yang dikembangkan Cerf. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan memiliki korelasi positif dengan ukuran aset perusahaan, proporsi kepemilikan saham publik, *rate of return* (*net profit* dibagi dengan *net worth*), dan *earning margin* (*net profit* dibagi dengan *net sales*). Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan lebih tinggi pada perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan melalui *over-the-counter*.

Penelitian Lang dan Lundholm (1993) membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sukarela lebih tinggi ditemukan pada perusahaan dengan hasil kinerja yang bagus, perusahaan dengan ukuran besar, perusahaan dengan hubungan antara *annual stock return* dan *annual earning* yang rendah, dan pada perusahaan yang menerbitkan sekuritas pada tahun berjalan atau dua tahun setelahnya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela dengan variabilitas hasil kinerja perusahaan lemah.

Suripto (1999) meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 1995. Terdapat tiga variabel keuangan, yaitu aset perusahaan, rasio *leverage*, dan rasio likuidasi, dan empat variabel dummy untuk membedakan antara perusahaan berbasis asing atau domestik, perusahaan yang terdaftar sebelum Pakdes 1987 atau sesudahnya, perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas pada periode berikutnya atau tidak, dan perusahaan bank atau non-bank. Penelitian ini membuktikan bahwa keseluruhan variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi tingkat luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Tetapi secara individu, hanya ukuran perusahaan dan rencana perusahaan untuk menerbitkan sekuritas pada periode berikutnya atau tidak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Dari penelitian Tjakradinata (2000) diperoleh bukti bahwa kualitas pengungkapan dalam laporan tahunan, baik pengungkapan wajib maupun sukarela, dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat laba, jumlah pemegang saham, status pendaftaran saham (*single listing* atau *multiple listing*), KAP yang mengaudit, dan jenis industri.

Dari penelitian Cheng dan Courtenay (2002) diperoleh bukti bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara proporsi komisaris independen dengan luas pengungkapan sukarela. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih besar memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Sedangkan perusahaan yang sebagian

besar anggota *board of directors*-nya menjalankan fungsi eksekutif perusahaan cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang rendah.

Sabeni (2002) meneliti pengaruh tingkat pengungkapan sukarela dengan komposisi dewan komisaris. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 153 perusahaan manufaktur. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komposisi komisaris independen dengan tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Dari penelitian ini juga dibuktikan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Penelitian Eng dan Mak (2003) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur kepemilikan dan komposisi *board of directors* dengan tingkat pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan diklasifikasikan menjadi tiga, kepemilikan oleh jajaran managerial, kepemilikan yang terpusat, dan kepemilikan oleh pemerintah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sukarela relatif tinggi pada perusahaan dengan proporsi kepemilikan oleh jajaran managerial kecil dan proporsi kepemilikan oleh pemerintah yang signifikan yang signifikan. Sedangkan variabel kepemilikan terpusat tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan dengan *board of directors* yang sebagian besar berasal dari luar perusahaan cenderung mengurangi informasi yang diungkapkan secara sukarela. Hal tersebut karena meningkatnya independensi *board of directors* sehingga kebutuhan akan pengungkapan

informasi secara sukarela berkurang. Penelitian ini juga membuktikan bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela.

Penelitian Amalia (2005) membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Sedangkan rasio *leverage*, basis perusahaan (PMA atau PMDN), umur perusahaan, dan perubahan laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela perusahaan.

2.5.2 Hipotesis 1

Dalam *Political Cost Theory* disebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan besar menghadapi berbagai tuntutan, dimana tuntutan tersebut dapat menimbulkan biaya "*Political Cost*" jika perusahaan tidak menangani dengan sebaik-baiknya. Pengungkapan sukarela atas berbagai informasi dijadikan solusi untuk meminimalkan munculnya *political cost* bagi perusahaan.

Dari pendekatan *Stakeholders Theory*, dapat dilihat bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan mempengaruhi banyak pihak. Semakin banyaknya pihak yang terkait meningkatkan tuntutan akan berbagai informasi seputar perusahaan. Maka dari itu, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang relatif lebih banyak.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya diperoleh bukti bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Cerf (1961), Singvhi dan Desai (1971), Lang dan Lundholm (1993), Surtoto (1999), Sabeni (2002), Eng dan Mak (2003), dan Amalia (2005), yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan perusahaan.

Dari penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan.

2.5.3 Hipotesis 2

Berdasarkan *Signalling Theory*, tingkat pengungkapan digunakan oleh pasar sebagai signal untuk menilai hasil kinerja perusahaan. Ketika perusahaan mengungkapkan informasi lebih luas dibanding dengan perusahaan lain, maka pasar menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang relatif lebih bagus. Dari pendekatan teori tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengungkapan informasi dipengaruhi oleh kinerja perusahaan.

Dari penelitian Lang dan Lundholm (1993) ditemukan bahwa perusahaan dengan skor pengungkapan tinggi merupakan perusahaan dengan kinerja yang bagus. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengungkapan dengan kinerja perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Cerf (1961) yang menyatakan bahwa indeks pengungkapan berkorelasi

positif dengan profitabilitas perusahaan. Penelitian Tjakradinata (2000) juga menyatakan bahwa tingkat laba perusahaan turut menentukan kualitas pengungkapan perusahaan.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah tingkat Return On Equity (ROE). Jadi, hipotesis yang kedua yaitu:

Hipotesis 2 = ROE perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan.

2.5.4 Hipotesis 3

Dari perspektif kedua di *Stakeholders Theory*, yaitu *accountability perspective* dijelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan hak seluruh *stakeholders* dalam memperoleh informasi tentang perusahaan. Perspektif tersebut sejalan dengan prinsip *transparency* dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam perkembangan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, muncul pemikiran tentang pentingnya sebuah komite yang independen untuk memastikan pelaporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Maka mulai dibentuk komite audit yang diketuai oleh seorang komisaris independen di perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-134/BL/2006.

Keberadaan komisaris independen bertujuan memainkan peranan penting dalam proses pelaporan keuangan dengan “*overseeing and monitoring management*” dan juga dalam keterlibatannya dengan auditor eksternal dalam

proses pelaporan keuangan. Terkait dengan fungsinya, maka keberadaan komisaris independen tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Cheng dan Courtenay (2002); dan penelitian Sabeni (2002). Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara proporsi komisaris independen dengan luas pengungkapan sukarela.

Dari penjelasan teori dan hasil penelitian di atas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

Hipotesis 3 = Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan.

2.5.5 Hipotesis 4

Terkait dengan hipotesis sebelumnya telah dijelaskan bahwa keberadaan komisaris independen dan komite audit memegang peranan penting dalam mengawasi kinerja auditor eksternal dalam mengaudit pelaporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal merupakan bagian yang penting dalam menjaga pelaporan keuangan agar memenuhi prinsip *transparency* dan *accountability*. Karena memiliki keterlibatan yang besar dengan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan, maka dapat dinyatakan bahwa kantor akuntan publik yang melaksanakan audit turut berpengaruh terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitian Tjakradinata (2000) dibuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan tinggi adalah perusahaan yang menggunakan KAP Big-

Four dalam mengaudit laporan keuangannya. Dari uraian di atas, maka hipotesis yang keempat adalah:

Hipotesis 4 = KAP yang mengaudit perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela laporan tahunan.

